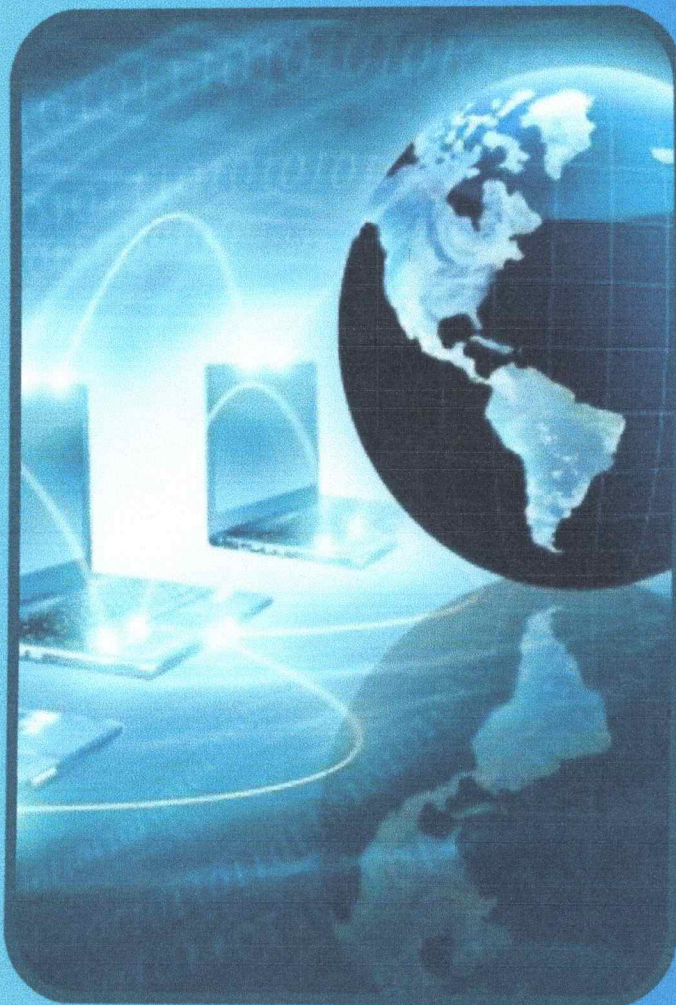




DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



RENJA 2025



DINAS KOMINFO LAMBAR



@KOMINFOLAMBAR



DISKOMINFO LAMBAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan RENJA ini.

Penyusunan RENJA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat dalam penyusunan RENJA ini, dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Liwa, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,



Munandar, S.Sos.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 197007241996031003

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	6
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	9
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	9
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	9
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	10
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	15
BAB V PENUTUP	16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (1), disebutkan bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

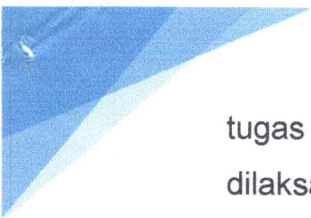
1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka Menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan



tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, Lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah:

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaiannya.
- b. Melakukan evaluasi serta analisis kinerja OPD pada tahun anggaran sebelumnya, agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangannya dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat; dan
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Awal Renja OPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab II merupakan Bab yang menguraikan tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi



Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- BAB III : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV : Bab IV merupakan Bab yang berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB V : Bab V merupakan Bab yang berisikan penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023, dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 Program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 11 kegiatan dan subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak 38 subkegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk belanja daerah sebesar Rp. 7.250.786.693,- terealisasi sebesar Rp. 7.093.356.073,- atau (97,83%).

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 2 (dua) subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100% yaitu:


1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi fisik/output sebesar 62,88%. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100% karena telah sesuai dengan tagihan air, listrik dan telepon.
2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi fisik/output sebesar 62,95%. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100% karena peralatan dan mesin sebagian besar masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan pemeliharaan.

Rata-rata Pencapaian indikator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, Menerima dan menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan pada TA. 2023 adalah sebagai berikut :

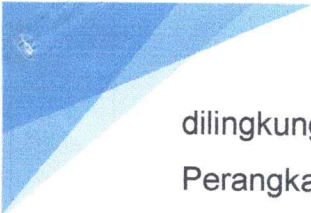
- 
- Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik, pencapaian indikator kinerjanya adalah :
 - a. Nilai Indeks SPBE dengan target 2,0 Poin, terealisasi sampai dengan tahun 2023 yaitu 2,76 Poin dengan predikat baik, capaian 138% (berdasarkan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung). Nilai indeks SPBE tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,6 poin.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil *review* pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan Informasi Teknologi di pemerintah daerah diberbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

1. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi baik dilingkup Bidang Kominfo maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.

Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, di samping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan Keterbukaan Informasi Publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompeten yang dapat merancang, menggunakan dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat diberbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya



dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Barat.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (*e-Government*) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem *e-Government* Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi *e-Government* sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Lampung Barat.

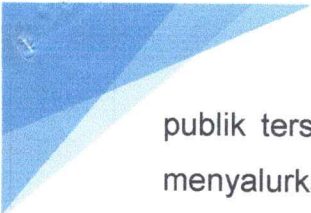
Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi *e-Government*, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal-hal tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan IT di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT Kabupaten Lampung Barat yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi Modern.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Lampiran I.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan fungsi tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan



publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatkan penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki program dan kegiatan berdasarkan usulan masyarakat Lampung Barat. Hanya saja, terdapat usulan masyarakat yang diakomodir di dalam kegiatan, yaitu usulan Proposal Pemasangan Wifi di Pekon/Kecamatan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penguatan manajemen komunikasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan manajemen komunikasi, diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing ditingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi antar operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika diseluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, internet dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- a) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis Informasi dan Teknologi.

2. Sasaran Strategis

Selanjutnya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik, dengan Indikator Kinerja Utama:
 1. Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

1. Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Sebagai OPD yang memiliki tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatkan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, Menerima dan menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatkan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

b) Dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan Nilai Indeks SPBE.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

2.1 Urusan Pemerintah wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar


1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- 
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan

1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub.Kegiatan

1. Pengadaan Mebel

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

A. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub.Kegiatan

1. Relasi Media
2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

A. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub.Kegiatan

1. Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
2. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

A. Kegiatan Penyelenggara Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

A. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2023 serta perkiraan pendanaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kode				Kegiatan/Sub.Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
02	16	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.364.793.893
02	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.801.500
02	16	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.150.700
			2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.711.500
			2.01.03	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.813.500
			2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.444.000
			2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.767.500
			2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.800
			2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.914.500
02	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.805.924.633
			2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.800.374.633
			2.02.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.500.000
			2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.050.000
			2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000
02	16	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.213.500
			2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.213.500
02	16	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.333.500
			2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.333.500
02	16	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.871.200
			2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.658.000
			2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	37.370.000
			2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.708.400
			2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000
			2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.064.800
			2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.010.000

02	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.800.000
			2.07.05	Pengadaan Mebel	6.800.000
02	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.756.000
			2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.175.000
			2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.200.000
			2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.381.000
02	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	145.093.560
			2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	79.300.000
			2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.318.560
			2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.475.000
02	16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.232.047.000
02	16	02	2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.232.047.000
			2.01.14	Relasi Media	2.971.612.000
			2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	276.099.200
			2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	745.021.200
			2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	133.748.400
			2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	105.566.200
02	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.072.077.300
02	16	03	2.02	Kegiatan Pengelolaan E-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.072.077.300
			2.02.15	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	467.967.000
			2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	402.593.000
			2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	201.508.300
2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	147.039.000
2	20	02	2.01	Kegiatan Penyelenggara Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	147.039.000
			2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	21.713.000
			2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	125.326.000
2	21	02		Urusan Pemerintah Bidang Persandian	433.051.150
2	21	02	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	433.051.150
			2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	147.169.150
			2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	179.198.000
			2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	106.684.000
Jumlah Anggaran					9.249.008.343



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengadakan Kerjasama Digital Media dalam hal Media Layanan Informasi Publik bagi masyarakat, Operasional Tim Bankom dan Pelayanan *Call* 112 akan selalu siap memberikan Informasi kepada masyarakat.

BAB V PENUTUP

Demikianlah uraian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025, sebagai rencana tahunan dan bagian dari perencanaan stratejik dan rencana umum jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini berisi program-program prioritas yang direncanakan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diiban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Pada tahap pembahasan nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Barat yang akan mempertimbangkannya dengan melihat prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Liwa, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lampung Barat,



Munandar, S.Sos.

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c

NIP 197007241996031003

LAMPIRAN I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Subkegiatan (Output)	Target Kinerja RPD (Renstra) pada s.d. Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP (Renja) s.d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP (Renja) Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP (Renja) yg dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi dan Anggaran RKP (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Renstra) sid Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	5	6	7	8	9 = 87 X 100%	10 = 6+8	11 = 105 X 100%	12	13				
2	16	DIMAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16 01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	81,43	11.695.798.000	2.870.456.110	3.136.219.160	3.136.219.160	100	2.870.456.110	3.136.219.160	6.006.675.270	100	100	Dinas Kominfo		
2	16 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	100	241.734.800	31.895.600	34.827.200	34.827.200	100	31.895.600	34.827.200	66.726.800	100	100	Dinas Kominfo		
2	16 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	32	32.716.800	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	10.000.000	50	31			
2	16 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen	4	34.960.000	6.116.000	6.045.600	6.045.600	100	6.045.600	6.045.600	12.163.600	50	35			
2	16 01 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen	4	27.368.000	4.789.400	4.789.400	4.789.400	100	4.789.400	4.789.400	9.578.800	50	35			
2	16 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	4	41.890.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000	100	5.235.000	5.235.000	10.470.000	50	25			
2	16 01 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan yang disusun 1 Dokumen	4	27.184.000	4.757.200	4.757.200	4.757.200	100	4.757.200	4.757.200	9.514.400	50	35			
2	16 01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Kinerja Ikhtisar Realisasi yang disusun 1 Dokumen	4	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	2.000.000	50	50			
2	16 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dok	48	73.616.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	100	8.000.000	8.000.000	13.000.000	50	18			
2	16 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun 4 Dokumen	4	9.210.413.200	2.432.387.101	2.690.311.100	2.690.311.100	100	2.690.311.100	2.690.311.100	5.122.698.201	4	100	Dinas Kominfo		
2	16 01 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah 12 Bulan	30	9.188.213.200	2.426.837.101	2.684.761.100	2.684.761.100	100	2.684.761.100	2.684.761.100	5.111.998.201	200	56			
2	16 01 2.02.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah 1 Dokumen	4	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	2.500.000	5.000.000	50	50			
2	16 01 2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah 1 Dokumen	4	4.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100	1.050.000	1.050.000	2.100.000	50	50			
2	16 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah 1 Dokumen	4	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	2.000.000	4.000.000	50	50			
2	16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	4	16.968.000	3.903.000	3.903.000	3.903.000	100	3.903.000	3.903.000	7.806.000	50	Dinas Kominfo			
2	16 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	16.968.000	3.903.000	3.903.000	3.903.000	100	3.903.000	3.903.000	7.806.000	50	46			
2	16 1 2.05	Administrasi Kepsawailan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29	17.448.000	4.362.000	4.333.500	4.333.500	100	4.333.500	4.333.500	8.695.500	50	Dinas Kominfo			
2	16 1 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Pemilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai	4	17.448.000	4.362.000	4.333.500	4.333.500	100	4.333.500	4.333.500	8.695.500	50	50			
3	16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	24	664.804.000	206.423.172	215.054.800	215.054.800	100	215.054.800	215.054.800	421.476.972	100	Dinas Kominfo			
2	16 01 2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lisrik Bangunan Kantor yang disediakan	14	18.632.000	4.658.000	4.658.000	4.658.000	100	4.658.000	4.658.000	9.316.000	50	50			
2	16 01 2.06.02	Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pralatan Perlengkapan Kantor yang disusun 3 jenis	20	84.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	17.000.000	50	20			
2	16 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang dan Penggandaan yang disediakan	144	125.636.000	19.903.200	20.803.200	20.803.200	100	20.803.200	20.803.200	40.706.400	50	32			

2	16	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 SKHU	12	Dokumen	12.240.000	3	3.060.000	3	3.060.000	100	100	6	6.120.000	50	50		
2	16	01	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan	48	Laporan	35.936.000	12	8.268.200	12	8.558.600	100	100	24	16.826.800	50	47		
2	16	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Konsultasi SKPD 12 Bulan	48	Laporan	408.360.000	12	169.532.772	12	161.975.000	100	100	24	331.507.772	50	81		
2	16	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah	16	Unit	61.600.000	4		4									
2	16	1	2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	Unit	61.600.000	4		4				8		50			
4	2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Laporan	586.290.000	4	83.344.842	4	71.181.000				154.325.842			Dinas Kominfo
			2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Administrasi Surat Menyurat Target 12 Bulan, Realisasi 12 Bulan	8	Laporan	17.400.000	2	1.600.000	2	1.600.000	100	100	4	5.564.000	50	32		
			2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik target 12 bulan, realisasi 12 bulan	3	Laporan	116.800.000	3	18.359.842	3	29.200.000	100	100	6	47.559.842	200	41		
			2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Sub Organisasi	4	Laporan	452.090.000	3	61.021.000	3	40.381.000	100	100	6	101.402.000	150	22		
5	2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Jenis	876.540.000	3	108.137.395	3	116.608.560				224.745.955			Dinas Kominfo
2	16	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10 unit	10	unit	561.320.000	10	81.209.885	10	79.300.000	100	100	20	160.509.885	200	29		
2	16	01	2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang disusun yang dipelihara 19 unit	25	unit	159.700.000	19	17.207.510	19	27.318.560	100	100	38	44.526.070	152	28		
2	16	01	02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2	Unit	155.520.000	2	9.720.000	2	9.990.000	100	100	4	19.710.000	200	13		
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	70	Poin	26.597.361.019	65	3.255.073.797	65	3.008.384.135					6.263.457.932			
2	16	02	2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi 8 jenis	6	Jenis	26.597.361.019	6	3.255.073.797	6	3.008.384.135	6	6	6	6.263.457.932	6			Dinas Kominfo
2	16	02	2.01.02	Monitoring opini dan aspirasi publik (Mobil Pencil-SMS Center)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8	Dokumen	1.823.447.764	2	86.808.688	2	68.824.335	100	100	4	155.633.023	50	9		
2	16	02	2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	48	Dokumen	2.088.301.488	12	113.228.548	12	83.494.400	100	100	24	196.922.948	50	9		
2	16	02	2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	4.606.791.189	3	337.943.906	3	338.034.800	100	100	6	675.978.706	50	15		
2	16	02	2.01.07	Layanan hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1600	layanan	15.783.750.274	400	2.482.704.928	400	2.385.179.600	###########	100	100	800	4.867.884.528	50	31	
2	16	02	2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah program kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	48	Dokumen	1.495.070.304	12	61.730.044	12	54.221.600	100	100	24	115.951.644	50	8		
2	16	02	2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48	unit	800.000.000	12	172.457.683	12	78.629.400	100	100	24	251.087.083	50	31		
2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan TIK 44 PD	60	%	7.791.721.792	40	360.741.900	40	620.967.000	44	44	44	981.708.900	44			
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub-Domain yang terpelihara, OPD yang Terhubung dengan Jaringan Intra, Kabupaten/Kota	4	Dokumen	972.813.933	1	0	1	0	0			0				
2	16	03	2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	19	Unit	972.813.933	0	0	0	0	0			0		0		
2	16	03	2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government ditinjau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Egovernment Kabupaten/Kota	8	Dokumen	6.818.907.859	1	360.741.900	1	620.967.000	1	1	1	981.708.900				Dinas Kominfo

2	16	03	02.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4	Unit	1.518.767.250	1	0	1	332.818.000	1	332.818.000	2	332.818.000	50	22	
2	16	03	2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4	Dokumen	5.300.140.609	1	360.741.900	1	288.149.000	1	288.149.000	100	648.890.900	50	12	
2	20	02		PROGRAM PERSYARAFAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Buku LEDA dan PDRE, Buku Promosi (Kopi) Investasi 150 Buku	100	%	646.046.000	71	121.914.100	71	123.001.000	71	123.001.000		244.915.100			
2	20	02		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen, Jumlah Buku LEDA, PDRE, Promosi Investasi (Kopi) 150 Buku	8	Dokumen	646.046.000	1	121.914.100	1	123.001.000	1	123.001.000		244.915.100			Dinas Kominfo
2	20	2	2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Destinasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Destinasi Data Statistik Sektoral	4	Dokumen	519.111.000	1	100.704.100	1	101.287.000	1	101.287.000	100	201.991.100	50	39	
2	20	2	2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM	112	orang	126.935.000	28	21.210.000	28	21.714.000	28	21.714.000	100	42.974.000	50	34	
2	21			PROGRAM PERSYARAFAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Seluruh Informasi / Jumlah seluruh yang dilaksanakan 5 model Persandian	100	%	2.590.315.275	100	198890050	100	253110250	100	253110250	5	452000300	5		
2	21	02		Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk penguasaan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah Penguasaan Informasi Pemerintah Daerah 3 Sub Organisasi	16	Laporan/ Dokumen	2.590.315.275	4	198890050	4	253110250	4	253110250	3	452000300	3		Dinas Kominfo
2	21	2	02.01.01	Penerapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	4	Dokumen	465.088.200	1	0	1	0	0	0	0	0	50		
2	21	2	2.01.02	Pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	60	Laporan	674.022.450	15	68.940.650	15	76.629.450	15	76.629.450	100	145.570.100	50	22	
2	21	2	2.01.02	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24	Laporan	696.142.000	6	69.655.400	6	116.166.800	6	116.166.800	100	185.827.200	50	27	
2	21	2	2.01.03	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	PD	755.062.625	15	60.394.000	15	60.314.000	15	60.314.000	100	120.608.000	200	16	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		2 Rekomendasi			133.748.400,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Publik			147.123.256,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ukrnis	50 %			1.072.077.300,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Publik			116.122.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	50 %			1.072.077.300,00							50 %	1.179.285.030,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Facilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemuda	Jumlah Pengelolan E-government	2 Dokumen			1.072.077.300,00					Pembangunan Infrastruktur	Perangkat Daerah		1.179.285.030,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Facilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemuda	1 Laporan			467.976.000,00	Kab. Lampung Barat, Bukit Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Pembangunan Infrastruktur	Perangkat Daerah		514.773.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringn Intra Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	44 unit			402.593.000,00	Kab. Lampung Barat, Bukit Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Pembangunan Infrastruktur	Perangkat Daerah		442.852.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzannya					10 Unit	79.300.000,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur		87.230.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					23 Unit	27.318.560,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur		30.050.416,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	38.475.000,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur		42.322.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					25 Dokumen	50.801.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.881.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Dokumen	8.711.500,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur		9.582.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					8 Dokumen	8.150.700,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.965.770,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen				-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	6.813.500,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.494.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	10.444.000,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur		11.488.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD									-	Reformasi Birokrasi 4, Reformasi Birokrasi	Aparatur			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.767.500,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Aparatur	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	999.800,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Reformasi Birokrasi 4.	Reformasi Birokrasi	Aparatur	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	8.914.500,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Reformasi Birokrasi 4.	Reformasi Birokrasi	Aparatur	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.805.924.633,00			Reformasi Birokrasi 4.	Reformasi Birokrasi	Aparatur	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2.800.374.633,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Reformasi Birokrasi 4.	Reformasi Birokrasi	Aparatur	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
			J U M L A H		9.249.008.343,00										9.942.325.366,00	